

BAB II

PEMERINTAHAN OTORITER DAN TRANSISI DEMOKRASI DI MESIR

Secara historis, dinamika politik pemerintahan Mesir tidak terlepas dari genggamannya kalangan militer yang otoriter. Militer telah menguasai Mesir sejak peristiwa kudeta yang dipimpin Gamal Abdel Nasser berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk pada tahun 1952. Pasca kudeta, hingga tahun 2011 secara terus-menerus pemerintahan Mesir diduduki oleh penguasa dari kalangan militer. Mulai dari Mohammad Naguib (1952-1954), Gamal Abdel Nasser (1954-1970), Anwar Sadat (1970-1981), hingga Hosni Mubarak (1981-2011) (Abdurahman, 2014, p. 128). Berakhirnya belenggu otoritarianisme di Mesir terjadi setelah dipicu oleh Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) yang meletus di Tunisia pada awal 2011. Gerakan protes menentang rezim otoritarianisme di Tunisia kemudian menjalar di beberapa negara di Timur Tengah termasuk Mesir dan Libya. Serangkaian peristiwa *Arab Spring* inilah yang menjadi titik awal kebangkitan demokrasi di Mesir (Gafur, 2014, p. 86). Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang dinamika politik pemerintahan Mesir di bawah rezim otoritarianisme dan bangkitnya demokrasi di Mesir sebagai dampak dari gelombang *Arab Spring*.

A. Otoritarianisme Di Mesir

Sejak terlepas dari penjajahan kolonial Inggris, Mesir merdeka pada Februari 1922. Harapan untuk menata pemerintahan yang demokratis mulai berjalan di Mesir dengan lahirnya sistem pemerintahan monarki konstitusional (Abdurahman, 2014, p. 117). Dalam konstitusi tahun 1923 yang menyebutkan bahwa rakyat adalah sumber semua kekuasaan (*power*) menjadi tonggak awal prinsip demokrasi di Mesir. Pemerintah monarki Mesir juga telah menerapkan sistem demokrasi parlementer. Namun impian untuk mewujudkan sistem demokrasi di Mesir akhirnya gagal setelah peristiwa kudeta militer pada 23 Juli 1952 berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk. Kudeta yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser telah merubah sistem pemerintahan Mesir menjadi republik dan menjadi permulaan bagi kekuasaan rezim militer di Mesir. Mesir kemudian dipimpin oleh Mohammad Naguib. Sejak militer berkuasa, pemerintah membatasi kebebasan peran sipil dalam berserikat dan berpolitik di tingkat nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah tahun 16 Januari 1953 yang melarang pembentukan partai politik di Mesir (Hasan, 2010, p. 320).

Pemerintahan Mesir di bawah Presiden Naguib hanya bertahan selama 2 tahun setelah digeser oleh koleganya, Gamal Abdel Nasser. Nasser kemudian resmi menjadi presiden pada 25 Februari 1954 (Agastya, 2013, p. 43). Dalam membangun Mesir, Nasser menanamkan ideologi sosialis-nasionalis dengan tujuan

mempersatukan nasional Mesir. Sistem pemerintahan sekuler yang cenderung kiri ini berhasil membangkitkan nasionalisme Arab. Salah satu contohnya, Nasser menerapkan kebijakan nasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956 (Basyar, 2015, p. 14). Dalam perjalanannya, meskipun rezim Nasser juga berhasil menciptakan keadilan sosial melalui program reformasi tanah yang mengembalikan hak-hak petani dan pekerja, namun tidak ada harapan bagi sistem demokrasi dapat berjalan di Mesir. Dalam tatanan politik pemerintahan, Nasser menerapkan sistem partai tunggal dimana hanya ada Partai Arab Sosialis (*Arab Socialist Union-ASU*) sebagai partai pendukung pemerintah yang berkuasa di Mesir (Abdurahman, 2014, p. 118). Sistem partai tunggal ini yang menjadi acuan bagi Nasser dalam menghapus parlemen dan memberhentikan seluruh elemen sipil dalam kehidupan politik di Mesir. Bahkan dalam kabinetnya, Nasser menempatkan kalangan militer hampir sepertiga bagian. (Kuncahyono, 2013, p. 208).

Di sisi lain, Nasser juga melakukan tindakan represif dalam menekan kelompok kepentingan. Sebagai contoh, pada tahun 1965 Nasser melarang organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan al Banna pada tahun 1928. Setahun kemudian sedikitnya 300 anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap dan dipenjarakan, satu tokoh divonis hukuman penjara seumur hidup dan tiga tokoh petinggi IM dijatuhi hukuman mati (Kuncahyono, 2013, p. 124). Dominasi militer dan penghapusan peran sipil dalam pemerintahan serta tindakan represif terhadap

kelompok IM semakin menunjukkan berlangsungnya otoritarianisme di bawah rezim militer Nasser.

Kekuasaan rezim Nasser berakhir pada tahun 1970. Nasser meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Pada saat itu, wakil presiden Mohammed Anwar Sadat otomatis menduduki kursi presiden menggantikan posisi Nasser. Sejak Sadat resmi menjabat sebagai kepala negara Mesir, sistem pemerintahan militeristik tetap berjalan di bawah kekuasaannya. Berbeda dengan era Nasser yang berideologi kiri, Sadat adalah penganut ideologi kanan dalam membangun pemerintahan sekuler di Mesir. Sadat mulai membuka sedikit ruang bagi kebebasan politik dan ekonomi (Basyar, 2015, p. 15). Sejak pemberlakuan liberalisasi politik, kekuatan politik Islam mulai nampak di Mesir. Munculnya berbagai gerakan dan organisasi Islam tidak hanya sebatas dalam sosial politik saja, namun juga dalam lingkungan aparatur negara. Bahkan Anwar Sadat juga menetapkan hukum Islam sebagai acuan dalam merancang konstitusi Mesir (Gafur, 2014, p. 94).

Melalui kebijakan liberalisasi politik dan ekonomi ini, pada tahun 1972 Sadat membebaskan beberapa tahanan politik anggota Ikhwanul Muslimin. Hal ini dilakukan Sadat untuk menarik dukungan dari kelompok IM, mengingat gerakan Islam ini memiliki anggota yang cukup banyak di Mesir. Pada tahun 1977, Sadat kembali memberlakukan sistem multipartai. Meskipun demikian, sistem multipartai yang berjalan belum sepenuhnya berasaskan asas demokrasi sesungguhnya.

Dukungan politik terhadap Anwar Sadat berasal dari Partai Arab Sosialis (*Arab Socialist Union-ASU*) bentukan Gamal Abdel Nasser. Namun Sadat kemudian mengganti nama partai pendukungnya menjadi Partai Nasional Demokrat (*National Democrat Party-NDP*) sebagai upaya menghilangkan citra Nasser yang melekat di dalamnya (Basyar, 2015, pp. 14-15).

Sejak pemberlakuan sistem multipartai, kebangkitan kekuatan Islam di bidang politik menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sejumlah kalangan terutama kelompok liberal-sekuler. Kalangan liberal-sekuler beranggapan bahwa dengan bangkitnya gerakan yang mengarah pada tujuan pembentukan Negara Islam justru akan mengancam kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat di Mesir. Oleh karena itu, Sadat juga bersikap represif terhadap gerakan dan organisasi Islam yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, berbagai upaya penangkapan dan penahanan terhadap gerakan Islam yang sebagian besar digalakkan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa akhirnya menuai protes rakyat Mesir dan dikecam oleh dunia internasional. Sikap dan tindakan otoriter Sadat dinilai melanggar Hak Asasi Manusia. Kekuasaan Sadat pun berakhir setelah dirinya ditembak mati oleh anggota Jihad Islam dalam sebuah parade militer pada 6 Oktober 1981 (Basyar, 2015, p. 15)

Selama Mesir berada di bawah rezim militer Gamal Abdel Nasser dan Mohammed Anwar Sadat, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah oligarki militer, dimana keterlibatan dan peran sipil dalam pemerintahan hanya bersifat

ornamen politik. Sementara dalam peralihan kepemimpinan biasanya terjadi karena peristiwa kudeta maupun dugaan rekayasa pembunuhan. Selepas rezim otoriter Sadat berkuasa, Mesir masih saja dipimpin oleh kalangan militer. Wakil presiden yang juga Mantan Komandan Angkatan Udara Mesir, Hosni Mubarak pada 14 Oktober 1981 resmi menggantikan posisi Sadat. Berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya, sistem pemerintahan Mesir di bawah rezim militer Mubarak mulai mengalami pergeseran ke arah pretorianisme otoriter. Meskipun Mubarak tetap memberlakukan sistem multipartai warisan dari rezim Sadat, peran militer pada awal kepemimpinan Mubarak tetap mendominasi pemerintahan. Bahkan dalam menjaga stabilitas domestik dan pembangunan Mesir, Mubarak menempatkan posisi militer sebagai *the most powerful constituency*, dimana keterlibatan militer juga berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan (Rofiq, 2015, p. 107). Terlebih dengan dibentuknya Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces-SCAF*) pada masa pemerintahan Mubarak, kalangan elit militer semakin menempati kedudukan tinggi dan terhormat sebagai aktor politik di Mesir (Gafur, 2014, p. 93).

Sebagai upaya memperbaiki hubungan dengan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi, Presiden Mubarak melakukan rekonsiliasi di awal pemerintahannya. Selain membebaskan tahanan tokoh-tokoh Islam, Mubarak juga memberi peluang kepada organisasi Ikhwanul Muslimin untuk bergabung dengan partai lain dalam memenangkan pemilu parlemen (Abdurahman, 2014, p. 119). Meskipun toleran terhadap organisasi Islam, namun Mubarak tetap bersikap tegas terhadap

kelompok Islam radikal yang menentang kebijakannya. Melalui Konstitusi Mesir 1981, Mubarak menerapkan Undang-undang (UU) Keadaan Darurat yang semakin memperluas kekuasaan aparat negara. Dengan adanya UU Keadaan Darurat, pemerintah Mesir dapat dengan leluasa menahan warga negaranya dalam jangka waktu yang tidak terbatas meskipun tanpa alasan yang jelas. Pemberlakuan UU Keadaan Darurat ini menyusul peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat oleh kelompok radikal Islam. Di bawah komando Mubarak, aparat negara melakukan penangkapan dan penahanan anggota gerakan Islam radikal yang memprotes kebijakan pemerintah (Basyar, 2015, p. 15).

Dalam kehidupan berpolitik, mulai terbentuknya pengakomodasian sipil dalam struktur pemerintahan pada prakteknya hanya menjadi jalan bagi legitimasi rezim militer yang otoriter. Meskipun Mubarak telah memperkuat sistem multipartai, kebebasan pers maupun berpendapat, namun Mubarak tetap membatasi gerak partai politik kubu oposisi. Hal ini kerap menuai protes, terlebih partai pendukung Mubarak, Partai Nasional Demokrat (*National Democrat Party-NDP*) selalu menguasai parlemen. Dalam pemilihan presiden, sistem yang berlaku adalah presiden dipilih oleh parlemen. Kandidat yang disetujui parlemen diajukan dalam referendum untuk mendapatkan persetujuan dari rakyat dan Mubarak selalu mendapat dukungan lebih dari 90 persen dari hasil referendum (Abdurahman, 2014, p. 122). Dominasi NDP di kursi parlemen ini yang mengantarkan Mubarak menduduki kursi presiden selama 4

periode hingga tahun 2005. Secara berturut-turut Presiden Mubarak memenangkan pemilu pada 1987, 1993 dan 1999.

Situasi politik di bawah kuasa Mubarak semakin memanas dan menjauhkan Mesir dari tatanan pemerintahan yang demokratis. Mubarak mendapat tekanan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Di dalam negeri, sekelompok aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam gerakan Kifayah, melakukan unjuk rasa menyatakan penolakan terhadap keberlanjutan kekuasaan Mubarak ataupun peralihan kekuasaan dengan sistem waris atau keturunan. Kifayah mengeluarkan petisi yang ditandatangani 3000 cendekiawan Mesir. Dalam petisi itu berisi pernyataan “Tidak perpanjangan jabatan, tidak sistem warisan”. Eksistensi putra Mubarak, Gamal Mubarak dalam dunia politik semakin memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dengan sistem waris. Terlebih, pengaruh Gamal Mubarak semakin kuat sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Politik Partai Nasional Demokrat (Abdurahman, 2014, p. 125).

Ada tiga program yang digalakkan gerakan Kifayah. Pertama, melakukan unjuk rasa. Sedikitnya telah dilakukan lima kali unjuk rasa oleh gerakan spontanitas pro demokrasi yang diikuti dari berbagai kalangan ini. Anggota kelompok ini berasal dari kalangan sosialis, liberal, sekuler maupun Islamis. Kedua, akan mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden yang akan disampaikan pada Maret 2005. Ketiga, melalui perwakilan yang berada di parlemen, akan menyiapkan Undang-

undang yang menyatakan bahwa parlemen saat ini tidak konstitusional dan tidak sah apabila kembali mencalonkan Hosni Mubarak sebagai kandidat dalam pemilu presiden (Abdurahman, 2014, p. 125). Berbagai desakan yang berdatangan, mendorong Mubarak melakukan upaya amandemen konstitusi. Pada pemilu September 2005, pemilihan presiden akan dilakukan secara langsung. Keputusan Mubarak mengamandemen konstitusi pasal 76 ini merupakan langkah awal dalam pembaharuan politik (Abdurahman, 2014, p. 119). Meskipun menyuarakan demokrasi dan menentang rezim otoriter Mubarak, akan tetapi dalam perjalanannya gerakan Kifayah tidak berhasil meraih dukungan yang banyak dari masyarakat akar rumput. Lagi-lagi Mubarak memenangkan pemilu pada September 2005 dan mengalahkan 10 kandidat lainnya. Mubarak dan rezim militernya dengan leluasa kembali melanjutkan otoritarianisme di Mesir hingga akhirnya peristiwa revolusi Mesir meletus pada tahun 2011.

B. Arab Spring dan Tumbangnya Rezim Otoriter di Mesir

Gerakan revolusi negara-negara Arab yang merebak pada tahun 2011, menjadi puncak dari gelombang protes rakyat terhadap rezim otoriter yang berkuasa selama puluhan tahun. Seruan aksi menuntut sistem pemerintahan yang adil dan demokratis menjadi isu utama dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi Tunisia, Libya, Mesir dan di negara-negara Arab lainnya. Momentum pecahnya revolusi ini menjadi titik awal kebangkitan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Banyak kalangan kemudian mengistilahkan gerakan revolusi negara-negara Arab

dengan sebutan *Arab Spring*. Istilah ini dipopulerkan oleh jurnalis Amerika Serikat, Mary Linch, dalam jurnal politik *Foreign Policy*. Apa yang bersemi dalam konteks ini adalah nilai-nilai demokrasi yang kemudian menyebar ke negara-negara sekitar (Nashrullah, 2015).

Gelombang revolusi ini dipicu oleh aksi bakar diri seorang pemuda (26 tahun) di Tunisia, sebagai bentuk protes lantaran lapangan pekerjaan yang tidak memadai menyebabkan kondisi ekonomi semakin memburuk. Menjadi seorang pedagang buah di pasar adalah pilihan Mohammed Bouazizi, seorang pemuda lulusan sarjana yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal di negaranya. Namun usaha Bouazizi ini mendapat perlakuan tidak adil dari aparat negara. Polisi mengusir dan menyita barang dagangannya karena dianggap melanggar peraturan. Aksi bakar diri yang dilakukan Bouazizi pada 18 Desember 2010 akhirnya membangkitkan gerakan solidaritas rakyat Tunisia untuk melawan pemerintahan rezim Zine El Abidine Ben Ali yang otoriter, korup dan represif (Agastya, 2013, p. 31). Gerakan solidaritas ini akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran yang berujung pada penyerahan tampuk kekuasaan pemimpin negara Tunisia. Presiden Ben Ali akhirnya lengser setelah 23 tahun berkuasa. Ia kemudian melarikan diri ke Arab Saudi pada 14 Januari 2011 (Riz, 2013). Pecahnya demonstrasi di Tunisia yang dikenal sebagai peristiwa Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) dengan cepat menyebar ke Mesir, Libya dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Rahman, 2011).

Revolusi Tunisia kemudian menjadi inspirasi bagi rakyat Libya dalam melawan pemimpin diktator Muammar Khadafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Pemberontakan serupa terjadi ketika kemarahan rakyat terhadap pemerintah semakin memuncak pada Februari 2011. Buruknya kondisi perekonomian negara serta tindakan represif rezim Khadafi yang melanggar Hak Asasi Manusia mendorong rakyat Libya melakukan aksi unjuk rasa menuntut Khadafi mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini digawangi oleh pasukan revolusi Dewan Transisi Nasional Libya (*National Transition Council-NTC*) yang baru terbentuk pada 17 Februari 2011. Gerakan pemberontakan yang terjadi sejak Maret 2011 di berbagai kota di Libya seperti Tripoli, Sirte dan Benghazi telah menelan 165 korban jiwa termasuk anak-anak. Hingga akhirnya rezim Khadafi tumbang setelah baku tembak melawan pasukan revolusi NTC. Di kota Sirte, Libya, Khadafi tewas di tangan pasukan revolusi NTC pada 20 Oktober 2011 (Agastya, 2013, p. 115).

Di Mesir, gerakan menentang rezim otoriter Hosni Mubarak terus berlanjut terlebih sejak Mubarak kembali memenangkan pemilu tahun 2005. Rezim otoriter Mubarak tercatat telah memimpin Mesir selama lima periode berturut-turut dan menjadikan Mubarak sebagai penguasa Mesir paling lama dalam sejarah. Selama 30 tahun rezim Mubarak berkuasa, dinamika politik Mesir seringkali diwarnai konflik internal seperti persaingan terbuka dan perebutan pengaruh antara kelompok Islam dengan kalangan sekuler-liberal (Gafur, 2014, p. 94). Situasi politik yang semakin carut marut di Mesir berujung pada lahirnya gerakan revolusi yang juga diilhami dari

Revolusi Melati di Tunisia. Gerakan revolusi rakyat Mesir berhasil menumbangkan rezim otoriter Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011, menyusul keberhasilan rakyat Tunisia melengserkan kepemimpinan Presiden Ben Ali (Abdurahman, 2014, p. 130). Pecahnya Revolusi Mesir berawal dari gerakan anti rezim-Mubarak yang digawangi para aktivis muda Mesir melalui jejaring sosial *Facebook*. Asmaa Mahfouz merilis seruan aksi protes di Lapangan Tahrir (*Tahrir Square*) pada 25 Januari 2011. Seruan aksi protes yang dirilis pada 18 Januari 2011, menjadi penggerak ribuan rakyat Mesir turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di Lapangan Tahrir, Kairo menuntut rezim otoriter Hosni Mubarak untuk turun dari jabatannya (Mandey, 2014).

Mesir adalah negara pertama yang terkena dampak *Arab Spring* pasca Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) di Tunisia. Sejak 25 Januari, ribuan rakyat Mesir melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Tahrir (*Tahrir Square*) menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur dari jabatannya. Dalam aksi ini terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat polisi dan mengakibatkan empat korban tewas termasuk seorang aparat keamanan. Pada hari kedua, pemerintah melakukan pemutusan jaringan internet untuk mencegah tersebarnya informasi mengenai aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Dalam aksi ini delapan wartawan dan ratusan demonstran ditangkap. Di hari ketiga, jumlah peserta aksi demonstrasi terus bertambah dan menyebar di sejumlah kota besar di Mesir. Ketua Dewan Nasional untuk Reformasi, Mohammed El Baradei meminta kepada Presiden Mubarak untuk mengambil langkah mundur dan melepaskan jabatannya. Hari keempat, Presiden

Mubarak membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru. Pada hari kelima, Presiden Mubarak mengangkat Ketua Dinas Intelejen Mesir, Omar Suleiman menjadi Wakil Presiden dan menunjuk mantan Menteri Penerbangan Sipil, Ahmad Shafiq untuk membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, jumlah korban tewas dalam aksi demonstrasi yang terus berlanjut mencapai 68 orang. Di sejumlah penjara Mesir juga terjadi bentrokan antara narapidana dengan sipir penjara yang mengakibatkan puluhan narapidana tewas (Abdurahman, 2014, pp. 130-132).

Hingga hari ketujuh belas, aksi demonstrasi menuntut Presiden Mubarak mengundurkan diri terus berlanjut. Kelompok oposisi menolak tawaran pemerintah untuk mengadakan perundingan terkait rencana amandemen konstitusi, reformasi dewan yudikatif serta upaya pengadaan lapangan pekerjaan yang baru. Meskipun pada akhirnya kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin bersedia berunding dengan pemerintah, namun dari hasil perundingan tidak mendapatkan kemajuan. Sementara peningkatan jumlah korban tewas dalam aksi demonstrasi mencapai lebih dari 300 orang. Para demonstran juga memblokir gedung parlemen dan kabinet. Situasi demonstrasi semakin memburuk, terlebih setelah Presiden Mubarak menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari kekuasaan sampai masa tugasnya berakhir, dan menyerahkan wewenang kepada wakilnya Omar Suleiman (Abdurahman, 2014, pp. 130-132)

Hingga akhirnya puncak revolusi terjadi di hari ke delapan belas pada 1 Februari 2011. Jutaan rakyat Mesir di berbagai kota terus melakukan aksi

demonstrasi dan ribuan demonstran bergerak menuju Istana Presiden di Ibukota, Kairo. Wakil Presiden Omar Suleiman akhirnya merespon tuntutan rakyat Mesir dengan mengumumkan pengunduran diri Presiden Mubarak dan penyerahan wewenang presiden kepada SCAF Mesir melalui saluran televisi nasional (Abdurahman, 2014, pp. 132-136). Keputusan Presiden Hosni Mubarak untuk mundur dari jabatannya disambut suka cita oleh rakyat Mesir. Peristiwa ini tercatat sebagai momen bersejarah tumbangnya kekuasaan rezim otoriter yang telah menaungi Mesir selama lebih dari 50 tahun (Agastya, 2013, p. 60)

C. Transisi Demokrasi Pasca *Arab Spring*

Berakhirnya sistem pemerintahan otoriter dan dimulainya masa transisi demokrasi menjadi babak selanjutnya yang harus dijalani Tunisia, Libya dan Mesir pasca *Arab Spring*. Di Tunisia, Partai Annahdah yang memenangkan pemilu parlemen pada Oktober 2011 kemudian membentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis. Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) yang dideklarasikan pada Agustus 2012, pemerintah tetap mempertahankan keberagaman dan sifat sekulerisme yang telah berjalan di Tunisia dengan tidak menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam menyusun konstitusi baru. Namun dalam perjalanannya, pemerintahan koalisi yang dipimpin Annahdah mendapatkan protes dari rakyat karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas keamanan pasca terbunuhnya dua orang tokoh oposisi di tangan gerakan radikal Islam Tunisia. Situasi politik yang semakin kacau

kembali memicu protes rakyat Tunisia hingga pada 28 September 2013 pemerintah koalisi yang dipimpin Annahdah menyetujui tuntutan rakyat untuk mundur dari pemerintahan. Kekacauan situasi politik pasca *Arab Spring*, mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan rakyat Tunisia terhadap sistem demokrasi yang dijanjikan pemerintah. Terkait hal ini, tidak menutup kemungkinan Tunisia mengalami kegagalan dalam proses transisi demokrasi (Kartini, 2015, pp. 48-49).

Sejak kekuasaan rezim Muammar Khadafi diambil alih Dewan Transisi Nasional (*NTC*) pada 22 Agustus 2011, Libya turut mengalami kesulitan dalam menjalani transisi demokrasi. Pemimpin diktator Khadafi yang menguasai Libya selama 42 tahun hanya mewariskan sebuah negara dengan institusi pemerintahan yang lemah dan tidak berjalan. Di bawah pemerintahan rezim Khadafi, rakyat Libya tidak memiliki pengalaman berdemokrasi karena tidak adanya konstitusi, partai politik, kelompok kepentingan dan media independen yang mengawal jalannya pemerintahan. Satu-satunya kelompok yang berkembang hanya kelompok berbasis kesukuan. Dapat dikatakan, Libya juga termasuk ke dalam kategori negara yang gagal dalam menjalani transisi demokrasi (Misrawi, 2011).

Sementara di Mesir, jatuhnya rezim Hosni Mubarak tidak serta merta mengakhiri kekuasaan militer. Pasca Presiden Mubarak mundur dari jabatannya pada 11 Februari 2011, pemerintahan sementara Mesir dipegang oleh SCAF Mesir. Bahkan untuk memperkuat posisi militer, pada tanggal 30 Maret 2011 SCAF

membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir. Namun rakyat Mesir tetap mendesak proses demokrasi di Mesir untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu SCAF memberi peluang kepada elite sipil untuk masuk dalam dunia politik pemerintahan Mesir melalui pemilu (Basyar, 2015)

Pemilu parlemen yang dilaksanakan tiga tahap pada 28 November 2011, 14 Desember 2011 dan 3 Januari 2013 dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan (*FJP*). Partai politik yang bernaung di bawah Ikhwanul Muslimin ini berhasil meraih 235 kursi dengan perolehan 47,18% suara. Di posisi kedua dimenangkan oleh kubu konservatif yaitu dari kelompok Salafi dengan Partai Annur yang memperoleh suara 121 kursi atau 25% suara. Sementara dari kubu liberal, Partai Wafd hanya meraih 36 kursi disusul partai sekuler, Koalisi Mesir meraih 33 kursi. Dari hasil pemilu parlemen yang dilaksanakan pertama kalinya setelah Revolusi Mesir 2011 ini, partai-partai Islam berhasil menguasai sekitar dua pertiga parlemen (Kistyarini, 2012)

Kemenangan FJP dalam pemilu parlemen memberikan angin segar bagi kelompok IM. Selanjutnya dalam pemilu presiden, FJP yang baru didirikan IM pada 22 Februari 2011 ini mengusung petinggi IM, Muhammad Mursi sebagai calon presiden. Pemilihan presiden Mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Terdapat 13 kandidat presiden pada pemilu putaran pertama ini hingga akhirnya tersisa dua nama yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Selanjutnya Mursi kembali memenangkan pemilu putaran kedua pada 24 Juni 2012. Komisi pemilihan umum Mesir pada 25 Juni

2012 mengumumkan bahwa Mursi menang dengan 51,8% dukungan dengan total perolehan 13.230.131 suara, mengalahkan Shafiq yang mendapat suara sebanyak 48,3% atau 12.347.380 suara dari 50 juta lebih warga Mesir yang memiliki hak untuk memberikan suara (Hidriyah, 2012, p. 5).

Kemenangan Muhammad Mursi dalam pemilu presiden ini menjadi tantangan bagi kalangan militer. Militer Mesir semakin khawatir, kekuasaan IM di pemerintahan akan membawa Mesir pada tatanan Negara Islam. Kekuatan kelompok IM yang telah terorganisir sejak pemerintahan Mesir dipegang oleh rezim otoriter di bawah Gamal Abdel Nasser menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi eksistensi militer di Mesir. Meluasnya pergerakan IM di tingkat nasional dikhawatirkan akan membawa Mesir yang menganut paham liberal sekuler menuju Negara Islam (*Islamic Order/Nizam al-Islam*). Berbagai upaya kemudian dilakukan militer Mesir untuk membatasi ruang gerak IM (Kartini, 2015).

Meskipun kelompok IM sendiri telah mendapat tekanan dalam kehidupan politik sejak rezim militer Gamal Abder Nasser hingga Hosni Mubarak, namun dinamika politik Islam di Mesir semakin pesat terlebih sejak diberlakukannya liberalisasi politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Hal ini didukung semakin meningkatnya Islamisasi di Mesir sejak di berlakukannya liberalisasi politik dan ekonomi pada tahun 1970. Sejak saat itu, Islamisasi mulai tumbuh dalam kehidupan politik dengan ditandai aktivitas beberapa gerakan politik

menggunakan lambang Islam dan merancang agenda politik dengan mengusung tatanan hukum Islam. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan politik yang mengusung tatanan hukum Islam. Gerakan Islam terbesar di Mesir ini berkembang pesat dengan berpedoman landasan-landasan ideologi gerakan, yaitu Al-Urubah (Arabisme), Wathaniyah (Patriotisme), Qaumiyyah (Nasionalisme) dan Alamiyyah (Internasionalisme) (Gafur, 2014, p. 90)

Untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan politik Mesir, Mursi dari kalangan elit sipil terpilih sebagai presiden secara demokratis melalui pemilu. Hal ini menunjukkan keberlangsungan transisi demokrasi di Mesir pasca tumbangannya rezim otoriter yang telah menaungi Mesir sejak tahun 1952. Meskipun demikian, pemerintahan Mursi tetap berada dalam bayang-bayang militer, dimana SCAF tetap memiliki otoritas untuk memilih Dewan Konstituante baru (Lisbet, 2013).

Sejak dilantik menjadi Presiden Mesir pada 30 Juni 2012, Mursi menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Situasi politik dan ekonomi di Mesir semakin memburuk. Kubu oposisi dan gerakan anti pemerintahan Mursi melakukan aksi protes menuntut Presiden Mursi mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi yang mengancam stabilitas keamanan di Mesir, mendorong SCAF melakukan kudeta militer terhadap Presiden Mursi. Kudeta yang dipimpin oleh Kepala SCAF, Abdel Fattah Al Sisi (Al Sisi) akan penulis bahas pada bab selanjutnya. Dalam bab II penulis juga akan membahas kemenangan Al Sisi

dalam pemilu presiden tahun 2014 serta dinamika politik pemerintahan Mesir selama satu tahun kepemimpinan Al Sisi.